

DATA STRATEGIS

KABUPATEN
KOLAKA UTARA

2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



DATA STRATEGIS

KABUPATEN
KOLAKA UTARA

2019

<http://kolutkab.bps.go.id>



DATA STRATEGIS KABUPATEN KOLAKA UTARA 2019

ISSN : -
No. Publikasi : 74080.2023
Katalog : 1103003.7408
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : viii + 73 hal

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Penyunting :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Ilustrasi Kulit : www.freepik.com
Ilustrasi Infografis : www.freepik.com, www.pngtree.com
Infografis : Tino Aprilian, S.Tr.Stat.

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Dicetak oleh :
Percetakan Loke

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara.



Kata Pengantar

Data statistik merupakan bagian penting dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan serta menentukan strategi kebijakan pembangunan. Data strategis yang bersifat umum dan ringkas sangat dibutuhkan bagi para pemangku kebijakan dan pengguna data lain termasuk akademisi, peneliti, dan swasta. Oleh karena itu, sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam mengakses data, BPS Kabupaten Kolaka Utara melalui Booklet Data Strategis Kabupaten Kolaka Utara 2019 menyajikan data-data strategis yang bersifat ringkas dan umum.

Data-data yang disajikan mencakup kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, pertanian, pembangunan manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan kemahalan konstruksi. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatannya, maka publikasi ini dilengkapi dengan penjelasan teknis berupa konsep dan definisi, metode penghitungan, serta cara menginterpretasikan data-data yang disajikan.

Kami menyadari bahwa booklet ini mungkin belum mampu memenuhi semua harapan para pengguna data. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami butuhkan demi penyempurnaan penerbitan selanjutnya. Semoga data yang tersajikan dalam booklet ini bermanfaat bagi para pengguna data untuk berbagai keperluan.

Lasusua, September 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kolaka Utara



Zablin, SST., M.Si.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I GEOGRAFI	 1
BAB II KEPENDUDUKAN	5
BAB III KETENAGAKERJAAN	13
BAB IV KEMISKINAN	23
BAB V PERTANIAN	31
BAB VI IPM	41
BAB VII PDRB	51
BAB VIII IKK	65
 Daftar Pustaka	 73

Daftar Tabel

Halaman

BAB I GEOGRAFI

Tabel 1.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2019.....	3
---	---

Tabel 1.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meterologi Sangia Ni Bandera, 2019.....	4
---	---

BAB II KEPENDUDUKAN

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019.....	8
--	---

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2019	11
---	----

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	12
--	----

BAB III KETENAGAKERJAAN

Tabel 3.1 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019.....	16
---	----

Tabel 3.2 Jumlah Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	16
--	----

Tabel 3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	19
---	----

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	19
---	----

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	19
---	----

BAB IV KEMISKINAN

Tabel 4.1 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	26
Tabel 4.2 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015-2019	26
Tabel 4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	29
Tabel 4.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015-2019	29

BAB V PERTANIAN

Tabel 5.1 Luas Lahan dan Luas Panen Padi Sawah di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	33
Tabel 5.2 Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	33
Tabel 5.3 Luas Panen Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	34
Tabel 5.4 Luas Panen Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	35
Tabel 5.5 Luas Panen Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	36
Tabel 5.6 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2018	37
Tabel 5.7 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2018	38
Tabel 5.8 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Kolaka Utara, 2018	39

BAB VI IPM

Tabel 6.1 Batas Maksimum dan Minimum Indeks Komponen IPM	45
Tabel 6.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019	46
Tabel 6.3 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019	47
Tabel 6.4 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019	48
Tabel 6.5 Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019	49
Tabel 6.6 Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019	50

BAB VII PDRB

Tabel 7.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019 ..	54
Tabel 7.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Utara 2015-2019	55
Tabel 7.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Utara 2015-2019	56
Tabel 7.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Utara (Juta Rupiah), 2015-2019	57
Tabel 7.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Utara (Juta Rupiah), 2015-2019	58
Tabel 7.6 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Utara (Persen), 2015-2019	59
Tabel 7.7 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Utara (Persen), 2015-2019	62
Tabel 7.8 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019	64

BAB VIII IKK

Tabel 8.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2019	72
---	----

<https://kolutkab.bps.go.id>

1

GEOGRAFI

Curah hujan tertinggi



264 mm/tahun
*Tahun 2019

Rata-rata suhu udara



29,65 °C

Kecamatan terkecil

Tiwu

81,92 km²

Kecamatan terluas

Porehu

647,23 km²

luas Wilayah

Kolaka Utara

3391,62 km²

Letak Wilayah

2°46'45" - 3°50'50" LS
120°41'16" - 121°26'31" BT

Batas-batas Wilayah

Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan

Pantai Timur
Teluk Bone



Kabupaten Kolaka Timur dan
Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Kolaka,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Sejak tahun 2008, pendataan Podes mengalami perubahan dengan adanya penambahan kuesioner suplemen kecamatan dan kabupaten/kota. Penambahan kuesioner tersebut bertujuan untuk meningkatkan manfaat data Podes bagi para konsumen data dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Data Podes merupakan satu-satunya sumber data kewilayahan yang muatannya beragam dan memberi gambaran tentang situasi pembangunan suatu wilayah (regional). Ini berbeda dengan data dari hasil pendekatan rumah tangga yang lebih menekankan pada dimensi aktivitas sektoral. Keduanya sama penting dan menjadi kekayaan BPS.

Cakupan Wilayah

Pencacahan Podes dilakukan secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (yaitu desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Podes 2014 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan. Petugas adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota, sementara narasumber adalah kepala desa/lurah atau narasumber lain yang memiliki pengetahuan terhadap wilayah target pencacahan.

Tabel 1.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2019

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas ¹ (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ranteangin	Ranteangin	189,92	5,60%	-
Lambai	Lambai	162,74	4,80%	-
Wawo	Wawo	234,99	6,93%	-
Lasusua	Lasusua	287,67	8,48%	-
Katoi	Katoi	82,64	2,44%	-
Kodeoha	Mala-Mala	250,49	7,39%	-
Tiwu	Tiwu	81,92	2,42%	-
Ngapa	Lapai	149,18	4,40%	-
Watunohu	Watunohu	109,99	3,24%	-
Pakue	Olo-Oloho	313,25	9,24%	-
Pakue Utara	Pakue	131,25	3,87%	-
Pakue Tengah	Latali	191,82	5,66%	-
Batu Putih	Batu Putih	374,95	11,06%	-
Porehu	Porehu	647,23	19,08%	-
Tolala	Tolala	183,58	5,41%	-
Kolaka Utara		3.391,62	100%	12*

Catatan : Luas wilayah kecamatan dihitung berdasarkan citra satelit
* Data jumlah pulau di Kabupaten Kolaka Utara tidak tersedia menurut kecamatan

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Utara
* Badan Informasi Geospasial Indonesia

**Tabel 1.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun
Meterologi Sangia Ni Bandera, 2019**

Bulan	Suhu (°C)			Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
	Minimum	Rata-rata	Maksimum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	23,2	30,05	34,8	152	16
Februari	23,4	29,44	34,9	231	12
Maret	20	29,68	36,2	146	20
April	23,4	29,26	35	264	21
Mei	23,6	29,17	35	209	15
Juni	22,2	28,54	34,7	253	16
Juli	20,6	28,42	34,8	45	11
Agustus	20,8	29,2	35,6	54	7
September	21	29,84	36,8	7	3
Oktober	22	30,36	38	75	9
November	21	31,28	37,7	-	1
Desember	23,8	30,57	35,3	137	17

Sumber : Badan Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera, Pomalaa-Kolaka



Jumlah penduduk
Kolaka Utara Tahun
2019

138.686 jiwa

*Data Registrasi Dukcapil

Laju pertumbuhan
penduduk Kolaka
Utara tahun
2018-2019 sebesar

0,27 %

Rasio Jenis Kelamin
Kolaka Utara Tahun 2019

105

“Setiap **100** penduduk perempuan
terdapat **105** penduduk laki-laki”



Jumlah
penduduk
perempuan 2019
73035 jiwa

Jumlah
penduduk
laki-laki 2019
77796 jiwa

*Data dari hasil proyeksi
penduduk Indonesia 2015-2045
(pertengahan tahun/Juni)



Pendahuluan

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pencacahan penduduk menggunakan konsep *usual residence* yaitu konsep dimana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi sedang bertugas ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya.

Adapun sumber data kependudukan lainnya adalah Survei Penduduk Antar Sensus dan registrasi penduduk. Survei Penduduk Antar Sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih diwawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi. Sedangkan data populasi berdasarkan registrasi penduduk diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggunakan pendekatan *de jure*.



KEPADATAN PENDUDUK

Konsep dan Definisi

Kepadatan penduduk dibagi menjadi 3 jenis :

1. Kepadatan penduduk kasar (*Crude Population Density*), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
2. Kepadatan fisiologis (*Physiological Density*), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah lahan yang ditanami (*cultivable land*).
3. Kepadatan agraris (*Agriculture Density*), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah *cultivable land*. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi dan tenaga kerja pertanian.

Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah di-standardisasi dengan luas wilayah.

Rumus

$$KP = P / A$$

KP : Kepadatan Penduduk
P : Jumlah Penduduk
A : Luas Wilayah (km²)

Kegunaan

1. Untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah
2. Digunakan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (program transmigrasi)

Interpretasi

Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Misalnya kepadatan penduduk Kabupaten Kolaka Utara tahun 2019 sebesar 41 artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di Kabupaten Kolaka Utara didiami oleh 41 penduduk.



Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Kecamatan	Penduduk (Ribu)					Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
	2015	2016	2017	2018	2019 ¹	2015	2016	2017	2018	2019 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ranteangin	5747	5786	5876	5933	6160	30	30	31	31	38
Lambai	5960	5987	6082	6277	6479	25	37	26	39	28
Wawo	6071	6140	6231	6283	6836	37	26	38	27	36
Lasusua	28270	28968	29338	29748	26231	98	101	102	103	238
Katoi	6806	6908	7006	7049	6947	82	84	85	85	11
Kodeoha	11199	11238	11419	11911	11441	45	45	46	48	62
Tiwu	4282	4300	4369	4524	4705	52	52	53	55	57
Ngapa	21514	21939	22236	22495	17704	144	147	149	151	93
Watunohu	6406	6416	6522	6940	6937	58	58	59	63	28
Pakue	9838	9873	10032	10458	10513	31	32	32	33	80
Pakue Tengah	6366	6379	6498	8440	7533	33	33	50	53	26
Pakue Utara	8152	8265	8369	6894	8218	62	63	44	44	26
Batu Putih	8664	8790	8915	8993	8663	21	23	24	24	58
Porehu	7765	7841	7960	8022	6848	13	12	12	12	18
Tolala	3666	3784	3828	3896	3471	20	21	21	21	42
Kolaka Utara	140706	142614	144681	147863	138686	41	42	43	44	41

Sumber : Data dari Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045 (Pertengahan tahun/Juni)

Catatan : ¹Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara



LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Konsep dan Definisi

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Rumus

$$r = (P_t / P_0)^{1/t} - 1$$

Metode geometri

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah Penduduk tahun t

P_0 : Jumlah Penduduk tahun awal

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Kegunaan

Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

Interpretasi

- $r > 0$ berarti terjadi penambahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- $r = 0$ berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan tahun sebelumnya.
- $r < 0$ berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



RASIO JENIS KELAMIN

Konsep dan Definisi

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 penduduk perempuan.

Rumus

$$SR = (P_L / P_w) \times 100$$

- SR : Rasio jenis kelamin
 P_L : Jumlah penduduk laki-laki
 P_w : Jumlah penduduk perempuan

Kegunaan

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, termasuk tanggapan yang berkaitan dengan pertimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui diketahui oleh para politisi, termasuk tanggapan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Interpretasi

- $SR > 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan
- $SR = 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan
- $SR < 100$ berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.



Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2019

Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018–2019 (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
Ranteangin	6160	1,85	106
Lambai	6479	0,4	106
Wawo	6836	1,35	101
Lasusua	26231	-0,06	103
Katoi	6947	0,43	105
Kodeoha	11441	0,53	103
Tiwu	4705	0,58	106
Ngapa	17704	-0,12	108
Watunohu	6937	1,81	105
Pakue	10513	-0,06	105
Pakue Tengah	7533	-0,44	103
Pakue Utara	8218	0,95	106
Batu Putih	8663	0,78	104
Porehu	6848	-2,49	108
Tolala	3471	0,35	106
Kolaka Utara			
Hasil Registrasi	138686	0,27	105
Hasil Proyeksi ¹	150831	2,01	107

Catatan : ¹Data dari Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara



Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Tahun	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	72.476	68.230	140.706	106
2016	73.482	69.132	142.614	106
2017	74.677	70.004	144.681	107
2018	76.299	71.564	147.863	107
2019	77.796	73.035	150.831	107

Catatan : Data dari Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Utara

<https://kolitkab.bps.go.id>

3



KETENAGAKERJAAN

STATUS PEKERJAAN UTAMA

2019



79,61 %

dari penduduk usia kerja di Kolaka Utara tahun 2019 merupakan angkatan kerja

34,66 %

merupakan **pekerja keluarga tak dibayar**



27,54 %

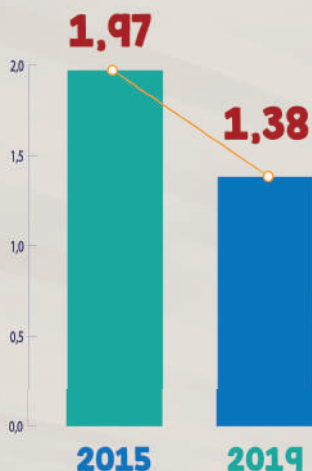
merupakan **berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**

19,10 %

merupakan **buruh/karyawan/pegawai**

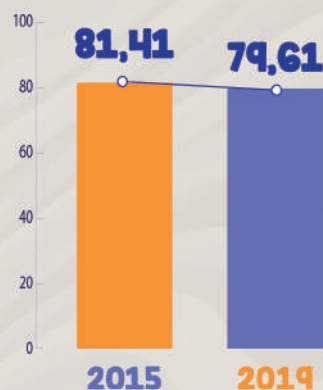


INDIKATOR KETENAGAKERJAAN



Tingkat Pengangguran Terbuka

“Dari **100** penduduk usia kerja pada tahun 2019, **1-2** orang merupakan pengangguran”



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Pendahuluan

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986-1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994-2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002-2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005-2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Mulai tahun 2011 Sakernas dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Hasil Sakernas Triwulan I, II, dan IV disajikan sampai tingkat provinsi (jumlah sampel 50.000 rumah tangga). Sementara Sakernas Triwulan III, disajikan sampai tingkat kabupaten/kota, karena jumlah sampel cukup besar sekitar 200.000 rumah tangga, dimana jumlah tersebut terdiri dari 50.000 rumah tangga merupakan sampel Sakernas Triwulanan dan 150.000 rumah tangga sampel Sakernas tambahan.



ANGKATAN KERJA

Konsep dan Definisi

Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi) Sebaliknya, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang tidak bekerja karena sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan/atau melakukan aktivitas lainnya.

Rumus

$$AK = a + b$$

AK : Angkatan Kerja

a : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja

b : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang pengangguran

Kegunaan

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.



**Tabel 3.1 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019**

Tahun	Angkatan Kerja						
	Bekerja		Pengangguran		Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
2015	44.921	31.056	536	988	45.457	32.044	77.501
2016 ¹	-	-	-	-	-	-	-
2017	687	26.404	659	1.283	46.344	27.687	74.031
2018	47.216	26.669	239	911	47.455	27.580	75.035
2019	48.814	32.599	238	905	49.052	33.504	82.556

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Catatan : ¹Data tahun 2016 tidak dapat diperoleh karena sampel kecil (Kegiatan Sakernas Tahunan Tahun 2016 ditiadakan karena penghematan anggaran)

**Tabel 3.2 Jumlah Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019**

Tahun	Bukan Angkatan Kerja							
	Sekolah		Mengurus Rumah Tangga		Lainnya		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2015	2.779	3.083	150	9.808	681	1.199	3.610	14.090
2016 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	1.726	2.026	536	16.500	2.399	1.526	4.661	20.052
2018	2.045	2.671	884	17.252	2.034	1.397	4.963	21.320
2019	2.337	2.543	785	13.075	1.334	1.067	4.456	16.685

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Catatan : ¹Data tahun 2016 tidak dapat diperoleh karena sampel kecil (Kegiatan Sakernas Tahunan Tahun 2016 ditiadakan karena penghematan anggaran)



TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Konsep dan Definisi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih). TPAK merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi (*economically active population*) di suatu negara atau wilayah.

Rumus

$$\text{TPAK} = (\text{AK} / P_{15+}) \times 100\%$$

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

AK : Jumlah angkatan kerja

P₁₅₊ : Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)

Kegunaan

Mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Interpretasi

Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Contoh jika TPAK Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2019 adalah 79,61% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 79 sampai 80 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tahun 2019.



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Konsep dan Definisi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok menganggur.

Rumus

$$\text{TPT} = (\text{Jumlah pengangguran} / \text{AK}) \times 100\%$$

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

AK : Jumlah angkatan kerja

Kegunaan

Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja).

Interpretasi

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal TPT Kabupaten Kolaka Utara tahun 2019 adalah 1,38 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 1 sampai 2 orang di antaranya merupakan pengangguran.



Tabel 3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	92,64	69,46	81,41
2016 ¹	-	-	-
2017	90,86	58,00	74,97
2018	90,53	56,40	74,06
2019	91,67	66,76	79,61

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Catatan : ¹Data tahun 2016 tidak dapat diperoleh karena sampel kecil (Kegiatan Sakernas Tahunan Tahun 2016 ditiadakan karena penghematan anggaran)

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	1,18	3,08	1,97
2016 ¹	-	-	-
2017	1,42	4,3	2,62
2018	0,50	1,86	1,53
2019	0,48	2,70	1,38

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Catatan : ¹Data tahun 2016 tidak dapat diperoleh karena sampel kecil (Kegiatan Sakernas Tahunan Tahun 2016 ditiadakan karena penghematan anggaran)



STATUS PEKERJAAN UTAMA

Konsep dan Definisi

1. **Berusaha sendiri** adalah kepala rumah tangga/anggota rumah tangga bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yang ditandai dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar.
2. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar** adalah kepala rumah tangga/anggota rumah tangga bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau buruh/karyawan/ pegawai tidak tetap.
3. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah kepala rumah tangga/anggota rumah tangga berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
4. **Buruh/karyawan/pegawai** adalah kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan.
5. **Pekerja bebas** adalah kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
6. **Pekerja keluarga atau tidak dibayar** adalah anggota rumah tangga yang bekerja membantu kepala rumah tangga/anggota rumah tangga lain/orang lain yang ber usaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.



Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Status Pekerjaan Utama	Jumlah				Persentase			
	2015	2017	2018	2019	2015	2017	2018	2019
Berusaha sendiri	5.642	10.916	8.002	9.661	8,80	15,14	10,83	11,87
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	23.211	25.686	24.131	22.425	36,19	35,63	32,66	27,54
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1.859	1.448	1.121	2.655	2,90	2,01	1,52	3,26
Buruh/karyawan/pegawai	8.720	11.046	13.411	15.549	13,60	15,32	18,15	19,10
Pekerja bebas pertanian	2.286	706	906	1.914	3,56	0,98	1,23	2,35
Pekerja bebas non pertanian	609	599	1.101	994	0,95	0,83	1,49	1,22
Pekerja keluarga/tak dibayar	21.805	21.688	25.213	28.215	34,00	30,09	34,12	34,66
Jumlah	64.132	72.089	73.885	81.413	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber :BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional



"sengaja dikosongkan"

<https://kolutkab.bps.go.id>

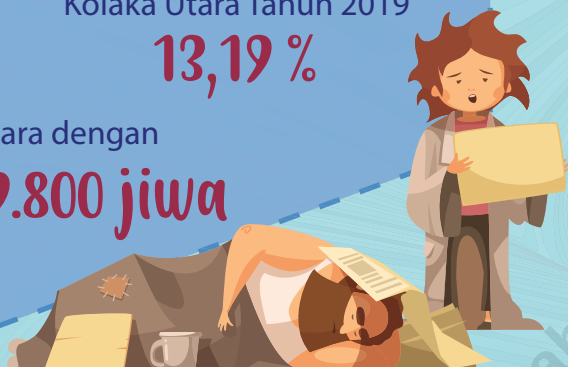


Persentase penduduk miskin
Kolaka Utara Tahun 2019

13,19 %

setara dengan

19.800 jiwa



16,53 %

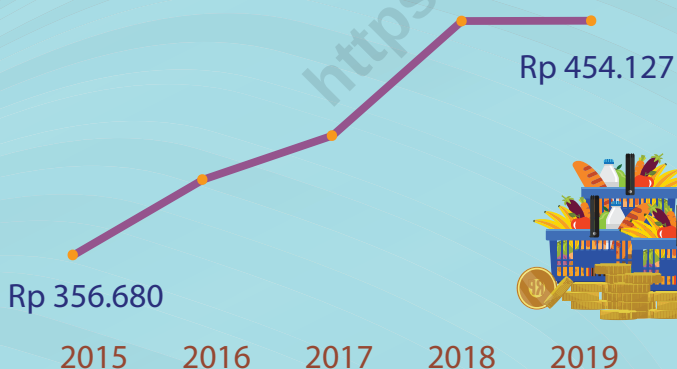
13,19 %

persentase penduduk
miskin menurun jika
dibandingkan tahun
2015

2015

2019

Garis Kemiskinan Kolaka Utara



*per kapita/bulan

penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah
Garis Kemiskinan dikate-
gorikan sebagai pen-
duduk miskin





Pendahuluan

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini digunakan juga di Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Sehingga definisi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK)/*poverty line*.

Garis kemiskinan (GK) adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) minimum makanan dan non-makanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Penghitungan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Tahap pertama penghitungan GK adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas GK. GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (Indeks Harga Konsumen). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM. GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 jenis komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya harga implisit rata-rata kalori tersebut dikalikan dengan 2100. Nilai ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978. Sedangkan GKNM adalah jumlah nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan. GK digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (*headcount index* – P_0), indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap* – P_1), dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* – P_2).



PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (P_0)

Konsep dan Definisi

Head Count Index ($HCI-P_0$) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK). *Head Count Index* secara sederhana mengatur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin sehingga diperoleh persentase penduduk miskin.

Rumus

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

P_0 : Persentase penduduk miskin

z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$); $y_i < z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

Kegunaan

Mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin.

Interpretasi

Angka yang ditunjukkan oleh P_0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tinggi pula.



Tabel 4.1 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Tahun (1)	Garis Kemiskinan (Rp) (2)	Jumlah (000 Jiwa) (3)	Persentase (%) (4)
2015	356.680	23,07	16,53
2016	388.041	24,32	17,11
2017	406.334	23,42	16,24
2018	453.994	21,30	14,30
2019	454.127	19,80	13,19

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 4.2 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015-2019

Tahun (1)	Garis Kemiskinan (Rp)		Persentase (%)	
	Kolaka Utara (2)	Sulawesi Tenggara (3)	Kolaka Utara (4)	Sulawesi Tenggara (5)
2015	356.680	269.516	16,53	13,74
2016	388.041	282.161	17,11	12,77
2017	406.334	300.258	16,24	11,97
2018	453.994	316.729	14,30	11,32
2019	454.127	346.466	13,19	11,04

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional



INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P_1)

Konsep dan Definisi

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Rumus

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$$

P_1 : Indeks Kedalaman Kemiskinan

z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$); $y_i < z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

Kegunaan

Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Interpretasi

Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sebaliknya jika semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.



INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P_2)

Konsep dan Definisi

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Rumus

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

P_2 : Indeks Keparahan Kemiskinan

z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$); $y_i < z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

Kegunaan

Memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinan (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Tabel 4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
(1)	(2)	(3)
2015	3,04	0,8
2016	3,52	1,11
2017	2,73	0,7
2018	2,71	0,74
2019	3,2	1,13

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 4.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015-2019

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan		Indeks Keparahan Kemiskinan	
	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	3,04	2,05	0,8	0,79
2016	3,52	1,98	1,11	0,90
2017	2,73	2,30	0,70	0,44
2018	2,71	2,09	0,74	0,52
2019	3,2	2,23	1,13	0,59

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional



"sengaja dikosongkan"

<https://kolutkab.bps.go.id>



Luas lahan panen padi
2019

3656 ha

Total produksi padi 2018

13949,87 ton



Luas lahan panen ubi
jalar 2019

20 ha

Total produksi ubi jalar
2018

529 ton



Luas lahan panen
kacang tanah 2019

21 ha

Total produksi kacang
tanah 2018

13 ton

Luas lahan panen jagung

2019

16274,4 ha

Total produksi jagung 2018

83828,22 ton



Luas lahan panen ubi kayu

2019

31 ha

Total produksi ubi kayu 2018

704 ton



Luas lahan panen cengkeh

2018

11172,28 ha

Total produksi cengkeh 2018

6012,5 ton



Luas lahan panen kakao 2018

79296,89 ha

Total produksi kakao 2018

50065 ton





Pendahuluan

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan dan menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Lahan Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija.

Bukan Lahan Sawah adalah semua lahan selain lahan sawah, lahan yang berstatus lahan sawah yang tidak berfungsi sebagai lahan sawah lagi dimasukkan dalam bukan lahan sawah.

Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Penyajian data produksi tanaman pangan tahun tertentu dilakukan sebanyak lima kali dengan status angka yang berbeda, yaitu Angka Ramalan I (ARAM I), Angka Ramalan II (ARAM II), Angka Ramalan III (ARAM III), Angka Sementara (ASEM), dan Angka Tetap (ATAP).

Luas panen berhasil (luas panen) adalah tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Dalam panen berhasil ini termasuk juga yang hasilnya sebagian saja dapat dipungut (paling sedikit sampai dengan 11 persen) yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam.

Produktivitas adalah penghitungan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi pada periode satu tahun laporan.



Tabel 5.1 Luas Lahan dan Luas Panen Padi Sawah di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Tahun	Luas Panen (Ha)	Luas Lahan (Ha)
(1)	(2)	(3)
2015	2054	2420
2016	2806	3134
2017	3310	3330
2018	3755	3820
2019	3656	2953

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan

Tabel 5.2 Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Kecamatan	Luas Panen (Ha) per Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ranteangin	8	11	165	692	494
Lambai	3	6	93,8	713,9	97
Wawo	3	-	-	607	112
Lasusua	42	112	497	930	1099
Katoi	40	79,8	245,5	251	201
Kodeoha	36	95	306	1555	1188
Tiwu	20	77,5	112,3	517,2	546
Ngapa	77	380	1097,5	1825,8	1270
Watunohu	12	61,5	260,8	1062,3	1315,5
Pakue	31	34,9	259,7	1845,8	2456,9
Pakue Utara	43	53,9	680,1	449,4	2086
Pakue Tengah	142	41,1	447,1	1516	1939
Batu Putih	10	59	469,5	1046,7	1921
Porehu	13	21	253	639,2	1365
Tolala	1	24	159	197	184
Jumlah	481	1056,7	5046,3	13848,3	16274,4

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan



Tabel 5.3 Luas Panen Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Kecamatan (1)	Luas Panen (Ha) per Tahun				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)
Ranteangin	1	-	-	-	-
Lambai	-	1	-	1	1
Wawo	-	-	-	-	-
Lasusua	4	4	1,5	-	-
Katoi	3	-	-	-	1
Kodeoha	-	-	-	-	-
Tiwu	-	-	-	1	-
Ngapa	6	3	4,5	7	8
Watunohu	-	-	-	-	-
Pakue	-	-	-	-	11
Pakue Utara	-	-	-	-	-
Pakue Tengah	55	8,9	2	-	-
Batu Putih	-	-	-	-	-
Porehu	3	-	-	-	-
Tolala	-	-	-	-	-
Jumlah	72	16,9	8	9	21

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan



Tabel 5.4 Luas Panen Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Kecamatan (1)	Luas Panen (Ha) per Tahun				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)
Ranteangin	1	-	1	-	-
Lambai	2	-	-	-	-
Wawo	2	2	-	-	-
Lasusua	5	8	6,5	5	4
Katoi	-	2	1	4	1
Kodeoha	-	-	-	-	-
Tiwu	4	3,5	3,5	2	1
Ngapa	-	1,9	2	-	-
Watunohu	-	0,5	-	-	3
Pakue	13	7	9	6	9
Pakue Utara	-	2,5	-	5	-
Pakue Tengah	52	3,9	2	1	-
Batu Putih	-	0,5	1	4	2
Porehu	-	6	4	3	-
Tolala	-	-	-	-	-
Jumlah	79	37,8	30	30	20

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan



Tabel 5.5 Luas Panen Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Kecamatan (1)	Luas Panen (Ha) per Tahun				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)
Ranteangin	-	-	-	-	0
Lambai	2	2	-	1	1
Wawo	-	3	-	-	-
Lasusua	2	4	3,5	1	2
Katoi	3	4	3	4	4
Kodeoha	-	-	-	-	1
Tiwu	1	3,5	3,5	1	1
Ngapa	-	2	2	2	-
Watunohu	1	3,2	1,5	9	8
Pakue	12	10	9	7	9
Pakue Utara	5	3	8	2	-
Pakue Tengah	62	9	-	-	-
Batu Putih	-	1	5	1	3
Porehu	1	9	4	5	2
Tolala	1	2	2	3	-
Jumlah	90	55,7	41,5	36	31

Sumber : BPS, Statistik Tanaman Pangan



Tabel 5.6 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2018

Kecamatan	Luas Areal Tanaman (Ha)				
	Kakao	Cengkeh	Pala	Lada	Kopi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ranteangin	2.206,01	492,10	12,50	39,95	12,00
Lambai	2.970,37	175,65	13,30	33,90	14,00
Wawo	2.076,51	507,25	0,50	19,40	11,50
Lasusua	6.788,83	2.596,00	51,00	222,20	31,50
Katoi	3.332,26	2.682,18	8,65	9,80	21,00
Kodeoha	5.091,10	1.182,88	157,10	46,45	13,50
Tiwu	1.941,27	458,80	37,85	13,20	-
Ngapa	17.609,25	783,22	109,30	36,20	19,75
Watunohu	1.893,35	53,00	14,50	4,10	-
Pakue	6.546,62	541,00	4,00	46,20	66,20
Pakue Utara	7.629,40	532,50	2,00	39,40	13,00
Pakue Tengah	1.240,70	514,50	282,06	3,00	12,10
Batu Putih	6.577,22	421,80	3,00	40,10	19,00
Porehu	10.921,75	83,90	11,20	67,50	22,50
Tolala	2.472,25	147,50	-	78,00	19,00
Kolaka Utara	79.296,89	11.172,28	706,96	699,40	275,05

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara



Tabel 5.7 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, 2018

Kecamatan (1)	Produksi (Ton)				
	Kakao (2)	Cengkeh (3)	Pala (4)	Lada (5)	Kopi (6)
Ranteangin	833,46	260,50	3,50	24,18	4,40
Lambai	1.896,46	393,20	2,04	27,00	4,60
Wawo	882,46	200,00	0,15	14,00	6,35
Lasusua	4.264,46	1.470,00	-	174,55	12,50
Katoi	1.679,51	1.490,00	1,60	4,65	5,20
Kodeoha	3.512,46	680,00	23,00	35,00	5,35
Tiwu	414,46	248,00	2,92	9,05	-
Ngapa	12.724,46	325,00	8,00	26,70	6,55
Watunohu	903,46	2,00	1,90	-	-
Pakue	4.185,51	274,30	0,54	28,70	21,40
Pakue Utara	5.077,46	279,00	0,40	32,60	4,52
Pakue Tengah	174,46	124,00	69,50	-	7,00
Batu Putih	4.839,46	172,00	0,85	29,40	11,41
Porehu	7.452,46	31,50	1,06	34,05	8,69
Tolala	1.224,46	63,00	-	42,00	8,10
Kolaka Utara	50.065,00	6.012,50	115,46	481,88	101,55

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara



Tabel 5.8 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Kolaka Utara, 2018

Tanaman (1)	Luas Panen (Ha) (2)	Produksi (Ton) (3)
Padi Sawah	3.755	13.949,87
Jagung	13.848,30	83.828,22
Kacang Tanah	9	13
Ubi Kayu	36	704
Ubi Jalar	30	529
Cengkeh	11.172,28	6.012,50
Kakao	79.269,89	50.065
Kopi	275,05	101,55
Lada	699,4	481,88
Pala	706,96	115,46

Sumber : BPS dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara

5



PERTANIAN

"sengaja dikosongkan"

<https://kolutkab.bps.go.id>

6



IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kolaka Utara 2019

69,81

Meningkat **0,68 %**
dibanding tahun 2018

IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar



Umur panjang dan hidup
sehat yang diukur melalui
**Angka Harapan Hidup
(AHH)**

Angka Harapan Hidup
penduduk Kolaka Utara
2019

70,15

tahun

meningkat **0,21** poin
dibanding tahun 2018



Pengetahuan yang diukur
melalui **Rata-rata Lama
Sekolah (RLS)**

Rata-rata Lama Sekolah
penduduk Kolaka Utara
berusia 15 tahun ke atas
tahun 2019

7,86

tahun



Standar hidup layak yang
diukur melalui **Pengeluar-
an per kapita**

Pengeluaran per kapita
penduduk Kolaka Utara
tahun 2019

Rp 10,3

juta

meningkat **1,23** persen
dibanding tahun 2018





Pendahuluan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Penghitungan IPM oleh BPS sudah menggunakan metode baru yang direkomendasikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dengan melakukan beberapa penyesuaian. Metode agregasi IPM disempurnakan dari penggunaan metode rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Penghitungan Komponen

Konsep dan Definisi

- **Angka Harapan Hidup (AHH)** atau Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Penghitungan AHH secara tidak langsung (*indirect technique*) dengan menggunakan dua data dasar yakni rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live birth*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) untuk setiap wanita berusia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan AHH dilakukan dengan perangkat lunak *Mortpak Life* dengan metode *Trussel* dan model *West*.
- **Harapan Lama Sekolah (HLS)** didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** merupakan kombinasi variabel pendidikan seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.
- **Standar hidup layak** menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

Rumus

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

$$HLS_7 = \sum_{i=7}^n \frac{E_i}{P_i}$$

E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah

P_i = Jumlah seluruh penduduk usia i

i = Usia (7,8,9,...,n) tahun

- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

$$RLS = \frac{\sum_i f_i \times L_i}{\sum_i f_i}$$

f_i = Frekuensi penduduk usia 25 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan ke- i

L_i = Lama sekolah untuk jenjang pendidikan ke- i

i = Jenjang pendidikan ke- i



- **Rata-rata Pengeluaran per Kapita Riil yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli**

$$ppp_j = \prod_{j=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

ppp_j = paritas daya beli di wilayah j
 p_{ij} = harga komoditas i di kabupaten/kota j
 p_{ik} = harga komoditas i di Kota Jakarta Selatan
 m = jumlah komoditas

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Dari masing-masing komponen IPM kemudian dihitung indeks dengan rumus sebagai berikut.

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \quad I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{PENDIDIKAN} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{PENGELUARAN} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$



Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti pada tabel 6.1 berikut.

Komponen (1)	Satuan (2)	Minimum (3)	Maksimum (4)
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara, Papua.
- Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{HLS} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Kegunaan IPM

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan pembangunan kualitas hidup manusia.
2. Kecepatan menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode.
3. Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.
4. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
5. IPM dijadikan sebagai salah satu indikator target pemerintah.



Interpretasi

Mengetahui capaian pembangunan manusia dilakukan melalui:

1. Kenaikan IPM secara nilai absolut yang diukur dengan pertumbuhan IPM.
2. Kenaikan status pembangunan manusia berdasarkan kategori UNDP:
 - Nilai IPM kurang dari 60 maka status pembangunan manusia di suatu wilayah rendah
 - Nilai IPM antara 60 - 70 maka status pembangunan manusia di suatu wilayah sedang
 - Nilai IPM antara 70 - 80 maka status pembangunan manusia di suatu wilayah tinggi
 - Nilai IPM lebih dari 80 maka status pembangunan manusia di suatu wilayah sangat tinggi.

**Tabel 6.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara
Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019**

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)
1	Kota Kendari	81,43	81,66	81,83	82,22	82,86
2	Kota Baubau	73,59	73,99	74,14	74,67	75,21
3	Kolaka	70,47	71,12	71,46	72,07	73,01
4	Konawe	69,56	69,84	70,24	70,72	71,29
5	Konawe Utara	66,44	67,20	67,71	68,50	69,22
6	Wakatobi	67,22	67,50	67,99	68,52	68,99
7	Muna	65,99	66,96	67,61	68,47	68,97
8	Kolaka Utara	66,90	67,60	67,77	68,44	68,91
9	Konawe Selatan	66,32	66,97	67,23	67,51	67,88
10	Buton Utara	65,23	65,95	66,40	67,13	67,68
11	Kolaka Timur	62,74	63,60	64,55	65,53	66,49
12	Buton	62,78	63,69	64,47	65,08	65,67
13	Bombana	63,65	64,02	64,49	65,04	65,65
14	Konawe Kepulauan	61,72	62,56	63,44	64,36	65,05
15	Muna Barat	62,29	65,57	63,43	64,11	64,45
16	Buton Selatan	62	62,55	63,20	63,47	64,37
17	Buton Tengah	62,13	62,56	62,82	63,46	64,06
	Sulawesi Tenggara	68,75	69,31	69,86	70,61	71,20

Sumber : BPS



Tabel 6.3 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
		2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)
1	Kota Kendari	72,94	72,98	73,02	73,26	73,52
2	Kolaka Timur	71,51	71,58	71,66	71,99	72,33
3	Kota Baubau	70,43	70,47	70,50	70,72	70,95
4	Buton Utara	70,36	70,37	70,38	70,56	70,75
5	Kolaka	69,90	69,97	70,05	70,38	70,72
6	Konawe Selatan	69,87	69,93	69,98	70,24	70,52
7	Muna	69,76	69,77	69,77	69,97	70,18
8	Muna Barat	69,76	69,78	69,79	69,97	70,16
9	Kolaka Utara	69,49	69,62	69,74	69,94	70,15
10	Wakatobi	69,49	69,54	69,59	69,85	70,13
11	Konawe	69,45	69,48	69,52	69,76	70,02
12	Konawe Utara	68,59	68,64	68,69	68,95	69,23
13	Bombana	67,62	67,72	67,82	68,17	68,54
14	Konawe Kepulauan	67,86	67,87	67,88	68,06	68,25
15	Buton	67,17	67,23	67,30	67,60	67,92
16	Buton Tengah	67,17	67,17	67,17	67,33	67,50
17	Buton Selatan	67,17	67,17	67,17	67,33	67,50
	Sulawesi Tenggara	70,44	70,46	70,47	70,72	70,97

Sumber : BPS



**Tabel 6.4 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara
Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019**

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)
1	Kota Kendari	11,66	11,67	11,68	11,69	11,94
2	Kota Baubau	9,80	9,89	9,90	10,13	10,37
3	Konawe Kepulauan	8,71	8,80	8,90	9,17	9,18
4	Konawe	8,59	8,60	8,77	8,94	9,14
5	Konawe Utara	8,24	8,41	8,62	8,81	8,97
6	Kolaka	8,18	8,19	8,31	8,57	8,76
7	Buton Utara	7,92	7,92	8,18	8,54	8,75
8	Muna	7,33	7,66	7,89	8,19	8,35
9	Kolaka Utara	7,48	7,49	7,50	7,67	7,86
10	Konawe Selatan	7,70	7,71	7,72	7,73	7,74
11	Bombana	7,51	7,52	7,53	7,54	7,74
12	Wakatobi	7,69	7,70	7,71	7,72	7,73
13	Buton	6,82	7,06	7,22	7,50	7,51
14	Kolaka Timur	6,39	6,65	6,90	7,18	7,35
15	Buton Selatan	6,55	6,81	7,06	6,01	7,32
16	Buton Tengah	6,79	7,01	7,02	7,28	7,29
17	Muna Barat	6,23	6,24	6,48	6,76	6,77
	Sulawesi Tenggara	8,18	8,32	8,46	8,69	8,91

Sumber : BPS



**Tabel 6.5 Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara
Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019**

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)
1	Kota Kendari	16,04	16,05	16,06	16,20	16,28
2	Kota Baubau	14,77	14,78	14,79	14,80	14,81
3	Muna	12,89	13,20	13,48	13,77	13,78
4	Buton	12,81	13,22	13,52	13,53	13,74
5	Wakatobi	12,82	12,87	13,14	13,15	13,20
6	Konawe	12,95	12,96	12,97	12,98	12,99
7	Buton Selatan	12,53	12,54	12,55	12,56	12,94
8	Kolaka	11,91	12,37	12,38	12,39	12,80
9	Buton Utara	12,27	12,72	12,73	12,74	12,75
10	Buton Tengah	12,30	12,31	12,32	12,35	12,70
11	Konawe Utara	11,65	11,93	12,02	12,33	12,54
12	Konawe Selatan	11,90	12,16	12,22	12,23	12,24
13	Muna Barat	11,62	11,64	12,06	12,13	12,20
14	Kolaka Timur	11,06	11,33	11,58	11,89	12,15
15	Kolaka Utara	11,64	11,92	11,93	12,09	12,10
16	Bombana	11,79	11,80	11,81	11,82	11,83
17	Konawe Kepulauan	10,46	10,94	11,30	11,59	11,81
	Sulawesi Tenggara	13,07	13,24	13,36	13,53	13,55

Sumber : BPS



Tabel 6.6 Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019

No.	Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (000 Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Buton	6.829	6.950	7.117	7.209	7.366
2	Muna	7.742	7.928	8.000	8.098	8.253
3	Konawe	9.471	9.696	9.857	10.004	10.200
4	Kolaka	11.942	12.072	12.243	12.384	12.525
5	Konawe Selatan	8.386	8.660	8.798	8.914	9.115
6	Bombana	7.392	7.607	7.908	8.190	8.344
7	Wakatobi	8.484	8.651	8.800	9.136	9.388
8	Kolaka Utara	9.535	9.846	9.941	10.133	10.258
9	Buton Utara	6.998	7.168	7.249	7.393	7.534
10	Konawe Utara	8.619	8.822	8.943	9.050	9.215
11	Kolaka Timur	7.157	7.283	7.499	7.606	7.832
12	Konawe Kepulauan	6.093	6.227	6.458	6.601	6.832
13	Muna Barat	7.063	7.221	7.288	7.405	7.526
14	Buton Tengah	6.759	6.860	7.012	7.160	7.264
15	Buton Selatan	6.715	6.859	7.075	7.192	7.293
16	Kota Kendari	13.558	13.828	13.995	14.168	14.392
17	Kota Baubau	9.852	10.110	10.223	10.374	10.523
	Sulawesi Tenggara	8.697	8.871	9.094	9.262	9.436

Sumber : BPS

7



P D R B

PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto)

Kolaka Utara

2019

8,67 triliun

Atas Dasar Harga Berlaku

6,33 triliun

Atas Dasar Harga Konstan

3 Lapangan Usaha Penyumbang
Terbesar PDRB 2019



Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan

41,01 %



Pertambangan dan
Penggalian

17,69 %

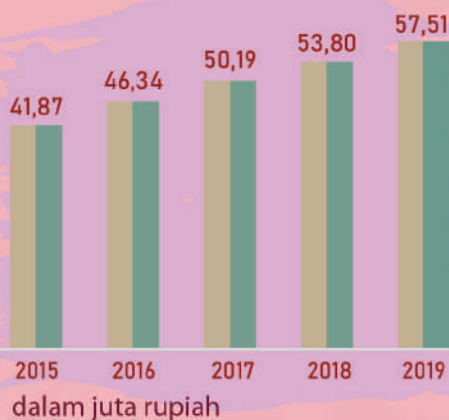


Konstruksi

15,44 %

Pendapatan setiap penduduk Kolaka Utara dicerminkan oleh nilai **PDRB per kapita**

dari tahun **2015-2019**, PDRB per kapita Kolaka Utara terus mengalami **peningkatan**





Pendahuluan

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Konsep dan Definisi

PDRB merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Angka PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Rumus

1. Pendekatan Produksi atau Lapangan Usaha

$$\text{Output}_{b,t} = \text{Produksi} \times \text{Harga}_t$$

$$\text{NTB}_{b,t} = \text{Output}_{b,t} \times \text{Biaya Antara}_{b,t}$$

atau

$$\text{NTB}_{b,t} = \text{Output}_{b,t} \times \text{Rasio NTB}_0$$

- $\text{Output}_{b,t}$: Output/nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku tahun t
- $\text{NTB}_{b,t}$: Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku tahun t
- Produksi_t : Kuantum produksi tahun ke-t
- Harga_t : Harga produksi tahun ke-t
- Rasio NTB : Perbandingan NTB terhadap output (NTB dibagi output)

2. Pendekatan Pengeluaran

$$\text{PDRB} = C + I + X + (E - M)$$

- C : Konsumsi akhir rumah tangga
- I : Investasi
- X : Pengeluaran pemerintah
- E : Ekspor
- M : Impor



Kegunaan

1. Indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah,
2. Bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa,
3. Bahan analisis produktivitas secara sektoral, dan
4. Alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Interpretasi

Misalnya pada tahun 2019 diketahui PDRB Kabupaten Kolaka Utara adalah sebesar 6.331.548,86 juta rupiah, yang artinya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2019 adalah senilai 6.331.548,86 juta rupiah atau sekitar 6,33 triliun rupiah.

Tabel 7.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2015	5.891.344,41	4.904.226,00
2016	6.608.051,53	5.280.490,30
2017	7.262.120,28	5.598.713,72
2018*	7.955.739,21	5.967.644,80
2019**	8.674.428,43	6.331.548,86

Catatan : *Angka Sementara
 **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS



Tabel 7.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Utara 2015-2019

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.138.270,90	2.281.410,26	2.427.521,24	2.567.430,71	2.695.006,29
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	42.828,26	44.908,55	49.328,77	53.050,62	57.798,92
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	422.541,80	435.093,48	464.744,48	496.265,72	530.062,17
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.880.458,38	2.055.323,67	2.224.326,50	2.356.078,75	2.512.983,93
Perubahan Inventori	31.156,75	37.428,60	70.215,43	5.619,62	6.110,94
Net Ekspor Barang dan Jasa	388.969,92	426.325,74	362.577,30	489.199,39	529.586,61
PDRB	4.904.226,00	5.280.490,30	5.598.713,72	5.967.644,80	6.331.548,86

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS



Tabel 7.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kolaka Utara 2015-2019

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.745.755,64	3.018.309,62	3.375.860,51	3.687.908,62	3.963.610
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	50.198,38	55.246,11	62.969,13	69.114,70	77.187
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	519.995,09	566.665,17	636.264,73	715.095,74	781.891
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.134.689,63	2.404.648,87	2.750.478,20	3.024.868,31	3.331.364
Perubahan Inventori	38.681,26	39.584,22	80.461,77	8.040,53	10.438
Net Ekspor Barang dan Jasa	402.024,40	523.597,54	356.085,95	450.711,30	509.939
PDRB	5.891.344,41	6.608.051,53	7.262.120,28	7.955.739,21	8.674.428

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS



Tabel 7.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Utara (Juta Rupiah), 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018 ¹	2019 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.117.854,86	2.267.063,43	2.404.468,99	2.584.851,54	2.698.248,41
B. Pertambangan dan Penggalan	814.315,63	861.454,37	930.702,02	994.025,36	1.081.095,88
C. Industri Pengolahan	49.659,39	54.217,04	58.312,94	58.889,97	61.472,46
D. Pengadaan Listrik dan Gas	740,24	795,43	844,68	892,59	955,69
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13.449,59	14.340,74	14.430,28	15.288,43	15.461,06
F. Konstruksi	673.525,76	741.551,04	770.876,56	821.410,78	885.255,64
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	595.781,08	655.905,84	702.656,50	743.357,61	807.417,68
H. Transportasi dan Pergudangan	81.981,19	89.431,15	93.875,48	102.028,67	106.642,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.080,31	24.044,08	25.534,71	27.325,17	28.333,28
J. Informasi dan Komunikasi	37.276,42	40.084,52	43.637,03	47.344,17	51.217,79
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	35.607,42	39.795,05	41.781,85	42.578,92	44.858,19
L. Real Estat	68.658,20	69.498,68	72.663,98	74.707,65	77.269,05
M,N. Jasa Perusahaan	1.132,98	1.237,53	1.318,89	1.395,69	1.433,93
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	150.270,38	156.037,79	162.858,92	163.031,60	165.553,07
P. Jasa Pendidikan	114.955,93	127.336,53	132.822,12	139.994,10	148.595,86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40.222,51	44.196,54	45.815,08	49.036,47	51.175,17
R, S, T, U Jasa Lainnya	86.714,13	93.500,55	96.113,70	101.486,08	106.563,46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.904.226,00	5.280.490,30	5.598.713,72	5.967.644,80	6.331.548,86

Catatan : ¹ Angka Sementara

²Angka Sangat Semetara

Sumber : BPS



Tabel 7.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Utara (Juta Rupiah), 2015-2019

Lapangan Usaha (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 ¹ (5)	2019 ² (6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.518.654,33	2.777.612,92	3.051.391,02	3.314.775,87	3.557.649,70
B. Pertambangan dan Penggalan	996.168,07	1.094.127,85	1.230.241,89	1.369.614,93	1.534.756,66
C. Industri Pengolahan	59.529,11	67.792,65	76.540,07	79.767,92	85.272,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	635,31	767,70	922,58	990,17	1.080,51
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16.140,45	17.665,21	18.113,08	19.267,62	19.496,19
F. Konstruksi	842.973,39	1.009.266,66	1.073.882,16	1.208.526,80	1.339.569,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	705.190,84	809.159,89	917.922,89	1.010.035,89	1.126.215,04
H. Transportasi dan Pergudangan	89.203,26	98.099,82	105.161,31	117.100,80	123.171,03
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.105,78	30.591,13	33.578,38	36.932,04	38.868,19
J. Informasi dan Komunikasi	36.282,37	39.918,27	44.367,36	48.214,31	52.633,29
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	46.511,93	53.690,11	58.677,62	61.830,82	66.476,33
L. Real Estat	80.040,71	85.859,20	92.174,58	95.545,90	100.304,09
M,N. Jasa Perusahaan	1.343,22	1.519,08	1.664,55	1.819,95	1.942,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	187.783,75	200.818,10	214.016,36	222.857,20	229.368,32
P. Jasa Pendidikan	134.891,74	156.141,80	169.162,41	180.553,57	196.914,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47.988,39	53.958,97	57.486,07	63.091,44	67.280,16
R, S, T, U Jasa Lainnya	100.901,78	111.062,16	116.817,94	124.814,01	133.431,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.891.344,41	6.608.051,53	7.262.120,28	7.955.739,21	8.674.428,43

Catatan : ¹ Angka Sementara
²Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS



DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB

Konsep dan Definisi

Distribusi persentase PDRB merupakan sumbangan dari setiap satuan unit pengamatan yaitu lapangan usaha dalam PDRB sektoral atau penggunaan dalam PDRB pengeluaran terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase.

Rumus

$$\text{Distribusi PDRB} = \frac{PDRB_i}{\sum PDRB} \times 100\%$$

$PDRB_i$ = Nilai PDRB lapangan usaha atau komponen penggunaan ke-i atas dasar harga berlaku

Kegunaan

Menunjukkan peranan/sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap PDRB periode tertentu.

Interpretasi

Misalnya besarnya sumber pertumbuhan PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2019 sebesar 41,01 persen, yang artinya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 41,01 persen terhadap nilai PDRB Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2019.



Tabel 7.6 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Utara (Persen), 2015-2019

Lapangan Usaha (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 ¹ (5)	2019 ² (6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,75	42,03	42,02	41,67	41,01
B. Pertambangan dan Penggalian	16,91	16,56	16,94	17,22	17,69
C. Industri Pengolahan	1,01	1,03	1,05	1,00	0,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,27	0,27	0,25	0,24	0,22
F. Konstruksi	14,31	15,27	14,79	15,19	15,44
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,97	12,25	12,64	12,70	12,98
H. Transportasi dan Pergudangan	1,51	1,48	1,45	1,47	1,42
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45
J. Informasi dan Komunikasi	0,62	0,60	0,61	0,61	0,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,79	0,81	0,81	0,78	0,77
L. Real Estat	1,36	1,30	1,27	1,20	1,16
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	3,04	2,95	2,80	2,64
P. Jasa Pendidikan	2,29	2,36	2,33	2,27	2,27
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,82	0,79	0,79	0,78
R, S, T, U Jasa Lainnya	1,71	1,68	1,61	1,57	1,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : ¹ Angka Sementara

²Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS



LAJU PERTUMBUHAN PDRB

Konsep dan Definisi

Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan PDRB. Penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga.

Rumus

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat dari suatu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100$$

PDRB_t = PDRB tahun ke-t

PDRB_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya (t-1)

Kegunaan

1. Untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional;
2. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional;
3. Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Interpretasi

Pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan barang dan jasa di satu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah.



**Tabel 7.7 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Utara (Persen), 2015-2019**

Lapangan Usaha (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 ¹ (5)	2019 ² (6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,77	7,05	6,06	7,50	4,39
B. Pertambangan dan Penggalian	0,47	5,79	8,04	6,80	8,76
C. Industri Pengolahan	15,57	9,18	7,55	0,99	4,39
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,45	7,45	6,19	5,67	7,07
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,95	6,63	0,62	5,95	1,13
F. Konstruksi	15,92	10,10	3,95	6,56	7,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,94	10,09	7,13	5,79	8,62
H. Transportasi dan Pergudangan	12,26	9,09	4,97	8,69	4,52
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,11	8,89	6,20	7,01	3,69
J. Informasi dan Komunikasi	12,78	7,53	8,86	8,50	8,18
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,37	11,76	4,99	1,91	5,35
L. Real Estat	11,97	1,22	4,55	2,81	3,43
M,N. Jasa Perusahaan	14,95	9,23	6,57	5,82	2,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12,99	3,84	4,37	0,11	1,55
P. Jasa Pendidikan	13,76	10,77	4,31	5,40	6,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,64	9,88	3,66	7,03	4,36
R, S, T, U Jasa Jasa Lainnya Lainnya	14,54	7,83	2,79	5,59	5,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7,05	7,67	6,03	6,59	6,10

Catatan : ¹ Angka Sementara

²Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS



PDRB PER KAPITA

Konsep dan Definisi

Nilai PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

Rumus

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB}{\Sigma \text{ Penduduk}} \times 100\%$$

Σ Penduduk = Jumlah Penduduk

Kegunaan

1. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
2. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Interpretasi

Misalnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kolaka Utara tahun 2019 sebesar 57,51 juta rupiah. Yang artinya pendapatan tiap penduduk Kabupaten Kolaka Utara secara rata-rata telah mencapai 57,51 juta rupiah selama setahun pada tahun 2019.



**Tabel 7.8 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
Kabupaten Kolaka Utara, 2015-2019**

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Juta Rupiah)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2015	41,87	34,85
2016	46,34	37,03
2017	50,19	38,70
2018*	53,80	40,36
2019**	57,51	41,98

Catatan : *Angka Sementara
 **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS

<https://kabutkab.bps.go.id>



IKK

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks spasial yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan. IKK digunakan salah satunya sebagai indikator dalam penghitungan **Dana Alokasi Umum**

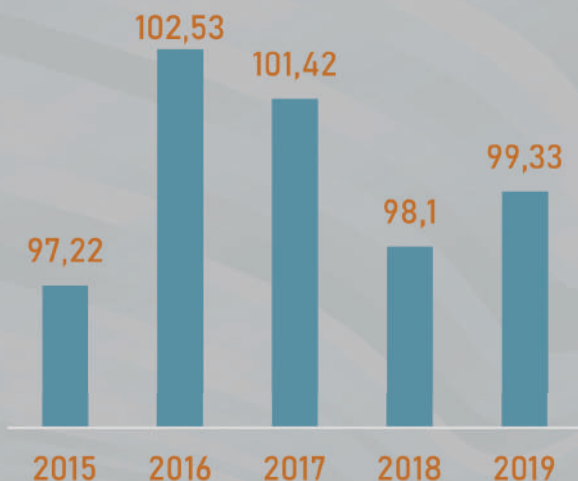


Komponen Bangunan Penyusun IKK

-  Bangunan tempat tinggal
-  Bangunan bukan tempat tinggal: gedung kantor, gedung pendidikan, dan lainnya
-  Jalan: aspal dan beton
-  Jembatan
-  Bangunan khusus untuk pertanian: jaringan irigasi
-  Instalasi listrik, gas, air minum, dan jaringan komunikasi
-  Bangunan lainnya, seperti: lapangan olahraga, lapangan parkir, sarana lingkungan pemukiman

IKK Kolaka Utara 2019

99,33



IKK Kolaka Utara cenderung fluktuatif tiap tahunnya, nilai IKK 99,33 pada tahun 2019 berarti:

“Tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi di Kolaka Utara **lebih rendah 0,67 %** dibandingkan harga rata-rata nasional”

dengan kota acuan Semarang



Pendahuluan

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lainnya. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas suatu kabupaten/kota atau provinsi. IKK ini dapat menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode waktu tertentu.

Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Data dihitung berdasarkan data harga triwulanan yang dikumpulkan pada bulan Juli dan Oktober tahun sebelumnya serta bulan Januari dan April pada tahun berjalan. Responden yang menjadi sumber data dalam kegiatan survei tersebut terdiri dari pedagang besar/distributor, pedagang eceran, kontraktor, dan Dinas Pekerjaan Umum. Diagram timbang penghitungan IKK menggunakan data *Bill of Quantity* (BoQ) dan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Dengan kata lain, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Namun, adanya penggunaan realisasi APBD dalam pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota. IKK juga menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) di samping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

Hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah perubahan metodologi dalam penghitungan IKK. Pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK disajikan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang kemudian dikalikan dengan suatu bilangan/inflator. Mulai tahun 2010, IKK disajikan dengan model yang berbeda yaitu dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, di mana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan. Pada tahun 2015-2017, kota acuan IKK adalah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka IKK sebesar 100 yaitu sama dengan rata-rata IKK 514 kabupaten/kota. Sementara itu, pada tahun 2018-2019 kota acuan IKK adalah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.



Penghitungan IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dengan biaya yang murah (menggunakan *Bill of Quantity/BoQ*).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading* yang terdiri dari 3 kategori berikut:

1. Gedung dan bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:
 - a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
 - b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal / stasiun dan bangunan monumental.
2. Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:
 - a. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
 - b. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.



- Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
- Bangunan jalan dan jembatan kereta.
- Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- c. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
 - Bangunan elektrik, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah, saluran drainase pada gedung.
 - Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 - Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
 - Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
 - Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
- 3. Bangunan lainnya yaitu antara lain bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.



Rumus

Penghitungan IKK dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k \cdot q_k$$

Dengan:

NK_j = Nilai Komponen ke-j

p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k

q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

Dengan:

NK_j = Nilai Komponen ke-j

C_i = Dummy kabupaten/kota ke-j

P_j = Dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan bangunan

α_i dan β_j = Koefisien regresi

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_i} = \prod_{i=1}^n (PPP_{sistem_i})^{w_{2i}}$$

Dengan:

n = Jumlah sistem dalam bangunan

w_{2i} = Penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi i

PPP (*Purchasing Power Parity*)_{sistem i} = $\exp(\alpha_i)$



Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{bangunan_i} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Dengan:

n = Jumlah sistem dalam bangunan

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa penimbang, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_i = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w1_i} \right) \cdot 100$$

Dengan:

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota



Kegunaan IKK

1. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
2. IKK merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 33 tahun 2004.
3. IKK merupakan spatial index, hanya digunakan untuk membandingkan antar wilayah, namun bukan perbandingan antar waktu.
4. IPM dijadikan sebagai salah satu indikator target pemerintah.

Interpretasi

Nilai IKK di atas 100 menunjukkan tingkat kemahalan bahan bangunan/konstruksi di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan dengan harga bangunan/konstruksi di kota acuan yang menjadi rata-rata nasional, begitu pula sebaliknya. Misalnya nilai IKK Kabupaten Kolaka Utara tahun 2019 adalah sebesar 99,33. Hal ini berarti tingkat kemahalan bahan bangunan/konstruksi di Kabupaten Kolaka Utara lebih rendah 0,67% dibandingkan dengan harga bangunan/konstruksi di Kota Semarang sebagai kota acuan.



Tabel 8.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2019

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)
1	Buton Selatan	111,22	103,16	114,26	110,55
2	Buton Utara	112,53	114,33	113,36	110,32
3	Muna Barat	107,20	105,68	110,77	107,49
4	Wakatobi	111,65	109,58	109,37	106,13
5	Bau-Bau	107,79	105,47	108,98	105,76
6	Buton Tengah	105,55	106,29	108,82	105,60
7	Konawe Kepulauan	103,01	106,15	108,12	104,97
8	Buton	101,91	97,23	107,40	104,05
9	Muna	101,81	101,93	106,70	103,54
10	Konawe Utara	98,06	88,93	103,55	100,48
11	Konawe	95,25	96,83	103,15	100,10
12	Kolaka Utara	102,53	101,42	98,10	99,33
13	Bombana	101,51	96,52	99,50	96,55
14	Konawe Selatan	96,33	91,12	97,87	94,97
15	Kolaka	93,21	91,3	96,75	93,89
16	Kolaka Timur	89,94	91,53	94,02	92,38
17	Kendari	97,76	92,65	93,34	91,45

Sumber : BPS

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan. 2018. *Data Strategis Kabupaten Buru Selatan 2018*. Namrole: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. 2020. *Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka 2020*. Lasusua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kolaka Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019*. Lasusua: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara 2019*. Kendari: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara. 2020. Tabel Dinamis diakses melalui <https://kolutkab.bps.go.id/subject>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. 2020. Tabel Dinamis diakses melalui <https://sultra.bps.go.id/subject>



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Jalan Protokol Poros DPRD Lasusua 93911, Telp. (0406) 2330029

Homepage : <https://kolutkab.bps.go.id> E-mail : bps7408@bps.go.id